



IPB University  
— Bogor Indonesia —

# 2025 POLICY BRIEF

Peran Perguruan Tinggi dalam  
*Pentahelix* untuk Atasi *Stunting*

Penulis:

**Ali Khomsan**



## Prevalensi *Problem Stunting*

Ketika seorang anak menderita masalah gizi seperti *stunting*, gizi kurang atau gizi buruk, maka seringkali ibu (perempuan) merasa paling bertanggung jawab terhadap keadaan ini. Ibu adalah orang paling dekat dalam pengasuhan balita terutama dalam hal pola asuh makannya.

Upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan perempuan, memberi kesempatan dalam berbagai sektor pekerjaan, serta memudahkan akses mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi akan berdampak besar pada kualitas bangsa secara keseluruhan.

Persoalan gizi adalah fenomena kompleks. UNICEF menyebutkan bahwa kendala ekonomi atau kemiskinan merupakan hal paling mendasar yang menyebabkan anak-anak balita terpuruk akibat kurang gizi (UNICEF 2021). Sebuah penelitian di Nusa Tenggara Barat mengungkapkan kebiasaan poligami berdampak buruk bagi balita karena pola asuh menjadi tidak optimal dan ibu balita harus *pontang-panting* menjadi pilar ekonomi keluarga (Syahfitri dan Fahlia 2021).

Perlu ada langkah-langkah luar biasa atau *extraordinary* untuk mengatasi problem gizi. Angka prevalensi *stunting* di Indonesia ditargetkan turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 atau turun 2,7 persen per tahun, pada kenyataannya prevalensi *stunting* masih 19,8 persen (SSGI 2024).

Pemetaan *stunting* sudah sangat detil dan jelas. Penderita *stunting* sudah dideteksi *by name by address* sehingga data yang ada dapat dijadikan dasar untuk membuat langkah-langkah konkret untuk penanganannya. Pemerintah meminta alokasi anggaran yang selama ini tersebar di 20 kementerian atau lembaga difokuskan kepada kementerian yang memang memiliki kepanjangan tangan langsung ke bawah. Program-program *stunting* di Indonesia berada di bawah koordinasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang kini telah menjelma menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Setkab 2021).

## Dapur Sehat Atasi *Stunting*

Sebelumnya, BKKBN telah meluncurkan inovasi Program DASHAT (Dapur Sehat Atasi *Stunting*). BKKBN meluncurkan DASHAT di Auditorium Pemerintah Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Agustus 2021. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*. DASHAT berlokasi di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dan menjadi pusat gizi serta pelayanan pada anak *stunting*. BKKBN bersama para ahli gizi telah menyusun menu sehat untuk DASHAT dengan konsep pemanfaatan produk pangan lokal.

Kegiatan DASHAT sendiri mencakup edukasi perbaikan gizi dan penyediaan konsumsi pangan ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Dalam hal ini, masyarakat akan diberi pengenalan pangan lokal yang terjangkau, bercita rasa, dan bergizi. Kegiatan kemitraan dengan swasta dalam penyelenggaraan DASHAT akan membuat program ini lebih lestari.

Di tahun 2022 BKKBN telah menggandeng PT Nestle Indonesia dalam suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk mengisi kegiatan DASHAT di Kabupaten Karawang bersama SPEAK (Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi). Ini adalah suatu contoh kemitraan strategis karena PT Nestle sebagai salah satu industri makanan dan minuman terkemuka telah berkontribusi dalam menjalankan DASHAT dengan menu-menu makanan mengandung pangan hewani (telur dan susu). Keterlibatan PT Nestle dalam DASHAT adalah wujud partisipasi swasta dalam mengisi unsur *pentahelix* dalam perbaikan gizi masyarakat.

## Peran Perguruan Tinggi dalam *Pentahelix*

Ada lima unsur *pentahelix* yang dapat bersinergi dalam perbaikan gizi yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan media massa. Sinergi pemerintah dan perguruan tinggi dalam perbaikan gizi akan mempunyai daya ungkit yang lebih baik dalam mengurangi angka *stunting*, gizi kurang, dan gizi buruk. Gizi

adalah input penting untuk menopang sumberdaya manusia (SDM). Selain gizi, pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor determinan untuk mencetak SDM unggul.

Forum Rektor Indonesia (FRI) telah menggandeng perguruan tinggi di Indonesia untuk bersinergi dengan BKKBN bersama-sama melaksanakan program pencegahan *stunting*. Banyak hal yang bisa dilakukan kampus-kampus Perguruan Tinggi di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan problem *stunting*. Mahasiswa program studi Ilmu Gizi dan Kesehatan Masyarakat yang selama 4-6 semester menempuh perkuliahan dan mendapatkan ilmu-ilmu teoritis dapat mengamalkan ilmunya dengan terjun ke masyarakat memperkuat program gizi seperti posyandu. Pendampingan pelaksanaan posyandu oleh mahasiswa akan berdampak positif terhadap performans dan kualitas program gizi.

Peran mahasiswa dalam mencermati program konvergensi *stunting* dapat dilakukan dengan membantu pendataan keluarga-keluarga rawan *stunting* sehingga mereka mendapatkan hak-haknya untuk menjadi peserta program-program sosial yang dirancang pemerintah. Berbagai program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah program-program yang sudah ada sejak beberapa lama dan kemudian diberi muatan *stunting*. Ketepatan sasaran penerima program menjadi *entry point* yang sangat penting sehingga program-program konvergensi *stunting* memiliki daya ungkit yang signifikan untuk mengatasi masalah gizi kronis ini.

Mahasiswa yang ikut dalam kegiatan Kampus Merdeka juga memiliki kemampuan dalam sosialisasi pemahaman *stunting*, faktor penyebab masalah, dan solusinya di tingkat masyarakat. Meski *stunting* sebagai istilah gizi kini semakin dikenal oleh masyarakat, namun pemahaman bahwa *stunting* berdampak pada intelektualitas anak dan kualitas sumber daya manusia perlu terus-menerus digaungkan. Dalam hal ini, peran kampus dalam menggerakkan mahasiswanya terjun ke masyarakat melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ataupun Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) tentu akan menjadi kontribusi penting dalam mengurai problem *stunting*.

Kerjasama yang digagas Forum Rektor Indonesia (FRI) bersama BKKBN pada dasarnya akan memanfaatkan sumber daya kampus (mahasiswa) untuk mengentaskan *stunting* di Indonesia. Untuk itu dukungan para rektor Perguruan Tinggi dan direktur Poltekkes/Stikes sangat diharapkan agar keterlibatan mahasiswanya dalam program penanggulangan *stunting* dapat difasilitasi secara maksimal demi tugas mulia yaitu perbaikan gizi masyarakat menuju SDM berkualitas.

Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 2 Juli 2024 dan mengatur tentang hak dan kewajiban ibu dan anak, terutama pada fase seribu hari pertama kehidupan (UU 2024). UU ini akan menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul. UU KIA juga menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia.

Lewat UU ini ingin dipastikan setiap hak ibu dan anak dapat terpenuhi. Termasuk hak pelayanan kesehatan, hak mendapatkan fasilitas khusus dan sarana prasarana di fasilitas umum, hak cuti enam bulan sehingga ibu bisa menyusui sesuai pedoman kesehatan (ASI eksklusif), hingga kepastian bagi ibu tetap dipekerjakan usai melahirkan.

Di Indonesia persentase pemberian ASI eksklusif bayi berusia 0-5 bulan sebesar 71,58% pada 2021. Angka ini menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 69,62%. Namun, sebagian besar provinsi masih memiliki persentase pemberian ASI eksklusif di bawah rata-rata nasional. Gorontalo tercatat sebagai provinsi dengan persentase terendah yakni hanya 52,75%. Diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara sebesar 55,98% dan 57,83% (SSGI 2021).

Mendorong dipraktikkannya ASI eksklusif tidak cukup kalau hanya melalui pendidikan gizi dan kesehatan bagi ibu hamil/menyusui. Harus ada kemauan politik dari pemerintah agar ibu yang baru melahirkan diberi kesempatan penuh menyusui bayinya selama enam bulan. RUU KIA menjadi *windows of opportunity* bagi perempuan untuk dapat memberikan ASI eksklusif selama enam bulan.

Mengoptimalkan perempuan untuk mengasuh anaknya dengan baik dan implementasi DASHAT yang didukung oleh swasta akan menjadi langkah nyata untuk memperbaiki gizi masyarakat. SDM tangguh dan berkualitas akan lebih mudah terwujud bila asupan gizi anak-anak diperhatikan oleh orang tuanya dan pemangku kepentingan (pemda, swasta, masyarakat) memberikan bantuan pangan pada keluarga-keluarga yang berisiko mengalami kurang gizi.

### Daftar Pustaka

- [Kemenkes} Kementerian Kesehatan. 2021. *Laporan Nasional Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021*. Jakarta: Kemenkes. <https://www.kemkes.go.id>
- [Kemenkes} Kementerian Kesehatan. 2024. *Laporan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024*. Jakarta: Kemenkes. <https://www.kemkes.go.id/>
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
- [Setkab RI] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021. *Presiden tunjuk Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: Setkab RI. <https://setkab.go.id/presiden-tunjuk-kepala-bkkbn-sebagai-ketua-pelaksana-program-percepatan-penurunan-stunting/>
- Syahfitri, W dan Fahlia. (2021). Dampak poligami terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi kasus: Kabupaten Sumbawa). *Nusantara Journal of Economics*, 3(1), 32–38.
- [UNICEF] United Nations International Children's Emergency Fund. 2021. *Conceptual framework on the determinants of maternal and child nutrition: A framework for the prevention of malnutrition in all its forms*. New York: UNICEF. <https://www.unicef.org/nutrition>

